

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah diolah dan diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro yaitu berupa data PAD Kota Metro dan data Retribusi Daerah Kota Metro. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro
Yaitu berupa data PAD Kota Metro, data Penerimaan Retribusi Daerah Kota Metro, data Target dan Realisasi Retribusi IMB.
2. Dinas Tata Kota Metro
Yaitu berupa data jumlah Subjek Retribusi dan Bangunan tempat usaha, Bangunan tempat tinggal, Bangunan lain-lain.
3. BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Bandar Lampung
Yaitu berupa gambaran umum tentang daerah Kota Metro (Metro dalam angka).

Ditambah data yang di peroleh dari studi pustaka yang akan digunakan untuk menerangkan kondisi yang dihadapi sehingga dapat diperoleh solusi yang terbaik yaitu dengan mempelajari literatur karya ilmiah, dan bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

B. Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif dan kuantitatif.

1) Analisis Kualitatif

Yaitu menganalisa masalah dan mencari pemecahannya dengan menggunakan teori-teori pendukung yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2) Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung tentang potensi retribusi IMB serta kontribusi IMB terhadap PAD Kota Metro sesuai data yang ada dengan menggunakan metode deskriptif.

a. Analisis Regresi Linier Sederhana

Untuk mengetahui perkiraan besarnya potensi penerimaan retribusi IMB di Kota Metro tahun 2004-2008, maka digunakan analisis Regresi Linier Sederhana.

Menurut Sugiyono persamaan regresi dapat digunakan untuk melakukan prediksi (ramalan) bagaimana dalam variabel dependen akan terjadi bila dalam variabel independen ditetapkan, adapun rumusnya sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Keterangan :

Y = Subyek dalam variabel yang diprediksi

a = Harga Y

b = Angka arah atau koefisien regresi

X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu

(Sumber : Sugiyono, 2006 : 244)

b. Perhitungan Potensi penerimaan retribusi IMB dari trend digunakan persamaan sebagai berikut :

$$TR = P \times Q$$

Keterangan :

P = Harga per meter² luas bangunan

Q = Jumlah luas bangunan per meter²

(Sumber : Diefta Prima, Skripsi 2009 : 38)

Menurut Nazir (2003:560) penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa masa sekarang. Alat analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif sebagai prosedur pemecahan permasalahan yang akan diteliti dengan menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan secara utuh dengan menggunakan analisis berikut ini.

Kontribusi retribusi IMB terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi IMB}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Tabel 6. Skala Interval Kontribusi

Persentase Tingkat Kontribusi	Kriteria Kontribusi
0,00 – 10,00 %	Sangat Kurang
10,01 – 20,00 %	Kurang
20,01 – 30,00 %	Sedang
30,01 – 40,00 %	Cukup
40,01 – 50,00 %	Baik
Di atas 50 %	Baik Sekali

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991
dalam (Hery, 2006:34)

Sedangkan untuk kesesuaian antara rencana dan realisasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Ketepatan atau tingkat pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

(Ibnu Syamsi, 1988 : 209)

- a. Menurut penelitian maka penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat diketahui dengan menggunakan perhitungan di bawah ini :

$$\text{Total Penerimaan} = \text{LB} \times \text{Jml.Tk Bangunan} \times \text{Tarif Bangunan}$$

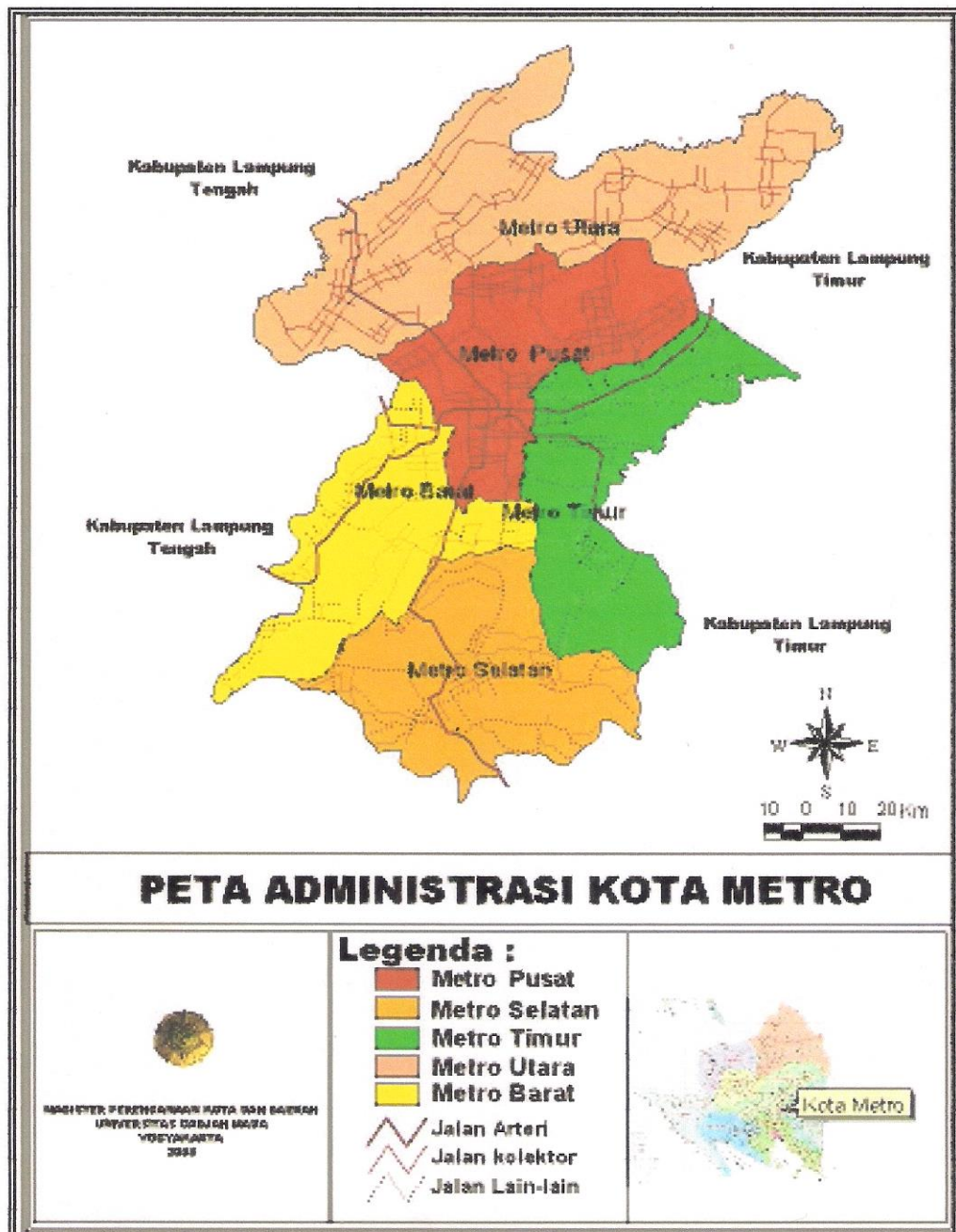
(Sumber : Perda Kota Metro Nomor 01, 2005 pasal 17).

Keterangan :

LB = Luas Bangunan (M^2)

C. Lokasi Penelitian

Dapat dilihat dalam Gambar 2 dibawah ini



Lokasi penelitian dilakukan di seluruh kecamatan di kota Metro.

1. Kecamatan Metro Pusat

Kecamatan Metro Pusat merupakan daerah yang sebagian besar digunakan sebagai daerah perdagangan, dikarenakan banyaknya bangunan seperti ruko bertingkat. Kecamatan Metro Pusat memiliki luas wilayah yaitu 11,71 km² dengan jumlah penduduk 42.361 jiwa, ini merupakan kecamatan yang paling banyak penduduknya di bandingkan kecamatan lain. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro, Kecamatan Metro pusat hanya untuk pusat pertokoan, perdagangan skala kota, pusat pemerintahan dan kawasan pemukiman penduduk tersebar di setiap kecamatan di Kota Metro.

2. Kecamatan Metro Selatan

Kecamatan Metro Selatan memiliki luas wilayah yaitu 14,33 km² dengan kawasan permukiman kepadatan sedang karena kecamatan ini memiliki jumlah penduduk tekecil yaitu sebesar 11.199 jiwa. Berdasarkan Tata Ruang Kota Metro wilayah ini sebagian besar terdapat area persawahan 3.519 hektar.

3. Kecamatan Metro Timur

Kecamatan Metro Timur memiliki luas wilayah yaitu 11,78 km² dengan jumlah penduduk sebesar 27.010 jiwa. Kecamatan Metro Timur ditetapkan sebagai kawasan pendidikan dan kawasan fasilitas sosial tersebar di seluruh kecamatan sesuai kebutuhan.

4. Kecamatan Metro Barat

Kecamatan Metro Barat memiliki luas wilayah yaitu 11,28 km² ini merupakan wilayah terkecil berdasarkan luasnya, dengan jumlah penduduk sebesar 18.408 jiwa.

5. Kecamatan Metro Utara

Kecamatan Metro Utara memiliki luas wilayah 19,64 km² dengan jumlah penduduk sebesar 19.470 jiwa. Berdasarkan Tata Ruang Kota Metro kawasan ini sebagian besar digunakan sebagai pusat industri dan pergudangan.

D. Gambaran Singkat Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro.

a. Sejarah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Metro

Dalam perkembangannya Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kota Metro ini telah mengalami beberapa kali perubahan status. Pada awal berdirinya kantor ini merupakan kantor DIPENDA (Dinas Pendapatan Daerah) Lampung Tengah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2000, tentang Susunan Kelembagaan Pemerintah Kota Metro, maka DIPENDA (Dinas Pendapatan Daerah) diubah menjadi BAPDA (Badan Pendapatan Daerah). Kemudian pada tanggal 24 Juni 2003, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2003, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro, maka BAPEDA (Badan Pendapatan Daerah) diubah kembali menjadi DIPENDA (Dinas Pendapatan Daerah).

Perubahan terakhir terjadi pada tahun 2008, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro yang dibuat eksekutif oleh Pemerintah Kota Metro bersama DPRD Kota Metro, yang mengubah status Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) menjadi Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro.

Dinas ini terbentuk dari penggabungan tiga organisasi ke dalam 1(satu) dinas, yaitu :

1. Dinas Pendapatan Daerah
2. Badan Keuangan Daerah
3. Bagian Perlengkapan

b. Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro.

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset daerah Kota Metro mempunyai tugas pokok, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan, Anggaran, Perbendaharaan, Belanja Pegawai dan Aset. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan, Anggaran, Perbendaharaan, Belanja Pegawai dan Aset.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendapatan, Anggaran, Perbendaharaan, Belanja Pegawai dan Aset.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan, Anggaran, Perbendaharaan, Belanja Pegawai dan Aset.
4. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas
5. Pelaksanaan tugas Lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro.

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Metro adalah terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a) Sub bagian perencanaan
 - b) Sub bagian keuangan
 - c) Sub bagian bagian umum dan kepegawaian
3. Bidang Pendapatan
 - a) Seksi pendataan dan penetapan
 - b) Seksi penagihan dan keberatan
 - c) Seksi pembukuan dan pelaporan pendapatan
4. Bidang Anggaran
 - a) Seksi pelaksanaan anggaran
 - b) Seksi akuntansi
 - c) Seksi pengendalian
5. Bidang Perbendaharaan dan Belanja Pegawai
 - a) Seksi perbendaharaan dan verifikasi
 - b) Seksi belanja pegawai
 - c) Seksi kas daerah
6. Bidang Aset
 - a) Seksi analisis kebutuhan dan standar harga
 - b) Seksi pengadaan
 - c) Seksi distribusi dan penyimpanan

E. Fungsi Dinas Tata Kota Kota Metro

Berdasarkan keputusan Walikota Metro Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, dalam melaksanakan tugasnya Dinas Tata Kota Metro memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebutuhan teknis di bidang pelaksanaan perkotaan, lingkungan hidup, hutan kota dan pertamanan.
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perkotaan, lingkungan hidup, hutan kota, dan pertamanan.
3. Penyelenggaraan tata usaha dinas sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang berlaku dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
4. Pengevaluasian hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pelaksanaan perkotaan, lingkungan hidup, hutan kota, dan pertamanan.
5. Penyelenggaraan pembinaan unit pelaksanaan teknis daerah.

F. Gambaran Singkat Kota Metro

Wilayah Kota Metro terletak pada bagian tengah Propinsi Lampung yang meliputi areal daratan seluas 68,74 Km² dengan ibukota Metro. Pada tanggal 27 April 1999, Kota Metro diresmikan sebagai daerah otonom berdasarkan UU No. 12 Tahun 1999, pada saat diresmikan Kota Metro terdiri dari 2 kecamatan yang meliputi 6 kelurahan dan 6 desa. Kemudian Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro No. 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasi Pemerintah Kota Metro di mekarkan menjadi 5 kecamatan yang meliputi 22 kelurahan dengan luas wilayah masing-masing kecamatan sebagai berikut :

1. Metro Pusat

- 1) Kelurahan Metro
- 2) Kelurahan Imopuro
- 3) Kelurahan Hadimulyo Barat
- 4) Kelurahan Hadimulyo timur
- 5) Kelurahan Yosomulyo

2. Metro Barat

- 1) Kelurahan Ganjar Agung
- 2) Kelurahan Ganjar Sari
- 3) Kelurahan Mulyojati
- 4) Kelurahan Mulyosari

3. Metro Timur

- 1) Kelurahan Iring Mulyo
- 2) Kelurahan Yosodadi
- 3) Kelurahan Yosorejo
- 4) Kelurahan Tejosari
- 5) Kelurahan Tejo Agung

4. Metro Selatan

- 1) Kelurahan Sumbersari
- 2) Kelurahan Rejomulyo
- 3) Kelurahan Margorejo
- 4) Kelurahan Margoadi

5. Metro Utara

- 1) Kelurahan Banjarsari
- 2) Kelurahan Purwasari
- 3) Kelurahan Purwoasri
- 4) Kelurahan Karang Rejo